

**PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BENCANA DALAM
KESIAPSIAGAAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Arifuddin Biki

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
arifudinbiki@rocketmail.com

Abstract

The research is aimed to describe the capacity condition of disaster care community group, design strengthen, implementation and capacity building improvement effort in landslide disaster preparedness in West Bandung District. From the description of the capacity of these groups viewed things that cause non optimal group later became the basis for the preparation of improvement plans and implement community capacity building in landslide disaster preparedness in West Bandung District. While the some aspects of the measure viewed the capacity of these groups are leadership, knowledge and skills, management of activities / programs of work, cooperation, relationships with outsiders, inclusiveness, information accessibility and sustainability group. Related to the strengthening of these groups are expected to contribute to the development of the disaster care community group and community development. This research used qualitative approach with action research method. In order to understand the existing problems, data sources obtained from officials and disaster care community group members and community by selecting data purposively. Data collection technique used indepth interview, focus group discussion (FGD) and participation observation. Data validity test technique used credibility test by improving persistence, triangulation, dependability and confirmability test. Based on that, the research result gathered from 5 informants illustrates that community group has not optimal yet in performing their role in community related to disaster preparedness and it is viewed on the management aspect of activities/ group programme.

Keywords: capacity building, community group, preparedness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang kondisi Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, model penguatan, implementasinya, dan upaya perbaikan penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dari deskripsi tentang kondisi kapasitas kelompok masyarakat dapat dilihat dari hal-hal yang menyebabkan kelompok belum maksimal yang selanjutnya hal ini dijadikan dasar persiapan rencana perbaikan dan penerapan penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Adapun gambaran beberapa aspek kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana dapat dilihat/diukur dari: aspek kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan, pengelolaan kegiatan/program kerjasama, hubungan dengan pihak luar, pelibatan masyarakat, aksesibilitas informasi, dan keberlanjutan organisasi/lembaga kelompok masyarakat tersebut. Dengan adanya penguatan kelompok masyarakat diharapkan dapat berperan pada pengembangan kelompok masyarakat peduli bencana dan pengembangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tindakan (*action research*). Dalam rangka untuk memahami permasalahan yang ada, sumber data diperoleh dari pengurus dan anggota kelompok masyarakat peduli bencana dan masyarakat dengan pemilihan (seleksi) data secara *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik

wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dan observasi partisipatif. Teknik pengujian/pemeriksaan keabsahan data untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan digunakan pengujian *persistence*, *triangulation*, *dependability*, dan pengujian *confirmability*. Hasil penelitian diperoleh dari 5 (lima) informan dan menggambarkan bahwa kelompok masyarakat tersebut belum maksimal dalam menjalankan peran mereka dalam masyarakat sehubungan dengan kesiapsiagaan bencana dan hal ini dapat dilihat dari aspek pengelolaan kegiatan-kegiatan/ program-program kelompok.

Kata kunci: penguatan kapasitas, kelompok masyarakat, kesiapsiagaan

Pendahuluan

Permasalahan bencana merupakan salah satu permasalahan serius yang menjadi pembicaraan orang banyak di Indonesia, baik itu bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Indonesia juga sering disebut sebagai "super market" bencana, dalam artian bahwa Indonesia disetiap pulau-pulainya merupakan wilayah yang rentan dengan ancaman bencana, baik itu gempa bumi, gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, konflik sosial /kerusakan bahkan sampai pada bencana teknologi atau kegagalan industri.

Terkait permasalahan bencana tersebut maka bencana longsor atau gerakan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang sering dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia. Ancaman gerakan tanah atau longsor dapat dikatakan hampir mengintai seluruh pulau di Indonesia dengan memiliki beberapa Kabupaten/ Kota yang rawan terhadap pergerakan tanah/longsor, kecuali pulau Kalimantan yang hanya memiliki dua Kabupaten yang rawan yakni Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Malinau di Kalimantan Timur. Secara umum kerawanan gerakan tanah/ longsor dipengaruhi keberadaan pegunungan dan lereng-lereng terjal dan diperburuk oleh curah hujan yang tinggi dan frekuensi gempa bumi yang sering terjadi. Selain itu juga disamping pengaruh geografis, gerakan tanah/ longsor dipengaruhi oleh risiko dengan berbagai aspek kerentanan, antara lain

kerentanan penduduk, bangunan infrastruktur, tingkat ekonomi, dan kapasitas daerah.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia (2011) menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah dengan kondisi kerawanan dengan berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, kekeringan, kebakaran pemukiman sampai dengan konflik sosial dan semua jenis bencana tersebut tersebar di 26 wilayah Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Barat dengan karakteristik kerentanan tinggi. Khususnya untuk Kabupaten Bandung Barat menempati ranking 177 nasional untuk kerawanan bencana dengan karakteristik ancaman skala tinggi. Berbicara masalah bencana khususnya tanah longsor, menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, wilayah Bandung Barat terdiri dari 15 Kecamatan yang merupakan wilayah yang memiliki kerentanan yang variatif, mulai dari kerentanan dengan karakteristik rendah, sedang/ menengah sampai karakteristik tinggi. Wilayah Kecamatan Lembang secara khusus pada Desa Cikidang merupakan lokasi yang pada pelaksanaan praktikum sebelumnya sebagai lokasi peneliti, merupakan salah satu yang wilayah yang merupakan rentan dengan karakteristik sedang/ menengah terhadap bencana tanah longsor.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka salah satu Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu Desa Cikidang merupakan salah satu gambaran wilayah yang menunjukkan bahwa kondisi kerentanan terhadap bencana tanah longsor di wilayah tersebut ditunjukkan

dengan kondisi geografis wilayah yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 800-1200 mdl pegunungan, berbukit dengan lereng-lereng terjal didukung dengan kondisi tekstur tanah yang gembur dan gundul sehingga hal tersebut secara langsung merupakan suatu kerawanan terhadap bencana longsor. Disamping penjelasan tersebut, hal lain yang menunjukkan kondisi kerentanan yaitu dimana masyarakat memanfaatkan keberadaan lahan dengan kondisi perbukitan dan lereng terjal tersebut untuk lahan pertanian, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Cikidang yaitu sebagai petani dan buruh tani. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi yaitu dimana ada beberapa kepala keluarga yang tinggal atau mendiami disekitar daerah yang persis dekat dengan lereng yang terjal dan pernah ada kegiatan pengambilan pasir yang dilakukan masyarakat pada wilayah lereng tersebut, namun saat ini sudah ada larangan oleh pihak Pemerintah Desa dan Kepolisian setempat.

Masih terkait dengan permasalahan kerentanan terhadap bencana tanah longsor, selain permasalahan dilihat dari geografis wilayah, pemanfaatan lahan yang berada di daerah rentan, berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dilakukan menunjukan bahwa data historis kejadian longsor menyebutkan bahwa Desa Cikidang sudah pernah mengalami kejadian longsor di beberapa wilayah RW, yaitu di RW 08, RW 05 pada tahun 2009 dan 2011, namun dampak dari kejadian tersebut belum menimbulkan kerugian berarti baik itu korban jiwa maupun materi. Pada pengkajian analisis risiko bencana yang dilakukan penilaian risiko bencana terhadap tanah longsor dilihat dari 1) aspek ancaman yaitu kategorisasi sedang dilihat dari komponen faktor penyebab (kondisi geografis dan intensitas curah hujan tinggi), komponen cakupan dan kekuatan bencana, komponen dampak bencana (manusia, pemukiman masyarakat dan lahan pertanian), komponen jenis ancaman (timbunan tanah). 2) dilihat dari aspek kerentanan ada beberapa poin permasalahan yaitu komponen kerentanan sosial (masih

kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana longsor, upaya penanggulangan bencana longsor, kesadaran dan kepedulian), komponen kerentanan ekonomi (kurangnya pendapatan masyarakat, pekerjaan/mata pencaharian masyarakat berada dilokasi rawan bencana dan ketergantungan terhadap tanah/alam). 3) dari aspek kemampuan/kapasitas terdapat beberapa poin permasalahan (kemampuan kelembagaan, kemampuan sumberdaya manusia (SDM), kemampuan sarana prasarana dan logistik serta kemampuan finansial untuk penanggulangan bencana).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka hal atau yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan yang dilakukan yaitu melalui model pengurangan risiko bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat. Asumsi pelaksanaan model tersebut yaitu mengacu pada pengurangan risiko dengan melihat ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat dengan langkah-langkah antisipasi dan peningkatan pemahaman masyarakat untuk upaya perubahan dari situasi permasalahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana melalui kesiapsiagaan yaitu meliputi Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, Sosialisasi dan Penyuluhan Bencana, Pemetaan wilayah Rawan Bencana Longsor serta Penghijauan sebagai upaya pelestarian alam. pada pelaksanaan model tersebut dilaksanakan menggunakan pendekatan *Community Organization/ Community Development* (CO/CD) atau pengembangan masyarakat dengan menerapkan model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*). Teknik yang digunakan yaitu observasi, studi dokumentasi, wawancara, transectwalk, pengkajian analisis risiko bencana dan perencanaan partisipatif (*ToP*). Sedangkan strategi yang digunakan yaitu pengembangan kapasitas, kolaborasi dan partisipasi dengan taktik implementasi. Adapun kontribusi peran pekerja sosial dalam model tersebut yaitu sebagai *enabler, fasilitator, dan broker*.

Namun pada pelaksanaannya berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan dirasa masih belum maksimal karena ada tahapan yang belum dilaksanakan yaitu bagaimana mempertahankan motivasi masyarakat, penguatan dan pengelolaan terkait kegiatan pengurangan risiko bencana melalui kesiapsiagaan serta pengembangan masyarakat dalam mengelola kegiatan pengurangan risiko bencana. Selain itu juga dilihat pada kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli bencana pada pelaksanaannya baru melakukan pembentukan dan penjelasan tugas dan peran saja, belum sampai pada taraf penyusunan kegiatan-kegiatan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada belum optimalnya kelompok masyarakat tersebut di dalam masyarakat dimana penjabaran tugas dan fungsi kelompok masyarakat belum bisa di jalankan sesuai harapan dengan kendala kapasitas yang dimiliki kelompok tersebut masih terbilang kurang aspek tertentu aspek, sehingga dampak pada masyarakat juga berpengaruh ketidakmampuan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Dari fakta tersebut, maka pada penelitian ini peneliti ingin menyempurnakan model pengurangan risiko pada masyarakat yang sama dengan mengembangkan masyarakat melalui kelompok masyarakat tersebut sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat memberikan rekomendasi sebuah model intervensi masyarakat yang dapat diterapkan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu dan dapat mengembangkan kegiatan dalam pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana Model Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana dalam Kesiapsiagaan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat ?”* Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut diajukan beberapa sub problematik sebagai berikut: a) bagaimana gambaran kapasitas kelompok

masyarakat?, b) bagaimana model penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana yang direncanakan?, c) bagaimana implementasi model penguatan kapasitas masyarakat peduli bencana?, dan d) bagaimana kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana setelah diterapkan penyempurnaan model penguatan kapasitas?.

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara praktis dan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana (KMPB) sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: a) Memperoleh gambaran kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana dilihat dari kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, pengelolaan kegiatan/program, kerjasama, hubungan dengan pihak luar, pelibatan masyarakat, aksesibilitas informasi dan keberlanjutan organisasi/lembaga dalam upaya kesiapsiagaan bencana, b) Mengembangkan model penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, c) Melaksanakan implementasi dan mengetahui penerapan hasil model penguatan kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, d) Penyempurnaan model penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana.

Tinjauan Pustaka

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tergantung pada cakupannya, bencana dapat merubah pola kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (Yayasan IDEP,2005). Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan B secara formal menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupam masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. UNDP berpendapat bencana adalah gangguan yang serius dari suatu fungsi masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian yang besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi dari kemampuan masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. (UNDP,1992).

Penanggulangan bencana adalah suatu proses dinamis, terencana, terorganisir, dan berlanjut untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pengamatan dan analisis bahaya serta pencegahan/mitigasi (pelunakan dan peredaman dampak bencana), kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (Soetarso dalam Lassa, 2009). Senada dengan hal tersebut, Pudjiono dalam Lassa (2009) menjelaskan penanggulangan bencana adalah suatu kumpulan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pencegahan, pengelolaan risiko dan tanggapan atas kejadian-kejadian bencana, baik sebelum maupun sesudah bencana.

UNDP-UNDRO (1992) menjelaskan bahwa tujuan dari kesiapsiagaan yaitu untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bencana lewat tindakan berjaga-jaga yang efektif untuk menjamin secara tepat upaya organisasi yang efisien, dan pengiriman respon emergensi yang menindaklanjuti dampak dari suatu bencana.

Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) merupakan kelompok yang dibentuk dalam masyarakat, didalamnya terdiri dari anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, dan pada perkembangannya atas hasil keputusan masyarakat bersama (IDEP,2005). Dalam KMPB ini masyarakat sendiri berhak untuk melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Penguatan kapasitas (*capacity building*) menurut Sumpeno (2002) merupakan suatu peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, atau system untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang telah

ditentukan secara efektif dan efisien. *Capacity building* merupakan strategi untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Selanjutnya menurut Anneli Milen (2006) bahwa pengembangan kapasitas adalah proses peningkatan terus menerus dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali dimana proses ini memerlukan bantuan dari luar.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2012). Masih dengan pendapat Sugiyono, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan pengumpulan informasi yang sistematis yang dirancang untuk menghasilkan perubahan sosial. (Bogdan & Biklen, 1982 yang dikutip oleh Burns, 1999:30 dalam Suwarsih Madya, 2007). Selain itu juga untuk memahami mengenai penelitian tindakan, Burns, 1999:30 dalam Suwarsih Madya (2007) menyebutkan bahwa “penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan didalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan bekerjasama para peneliti, praktisi dan orang awam”.

Jenis data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157) yaitu kata-kata dan tindakan karakteristik informan, dan hasilnya akan dicatat untuk selanjutnya menjadi data yang diperlukan, sumber tertulis, berasal dari

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan informan, program-program pemerintah dan lokasi penelitian, foto hasil pemotretan sebagai bukti visual dari kegiatan masyarakat dilapangan dan aktifitas informan, data statistik sebagai data-data yang tercatat dan terukur secara angka berupa tabel-tabel dan diagram yang berhubungan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Sedangkan sumber data yang ditetapkan untuk memberikan hasil maksimal sebagai acuan informasi yaitu berasal dari sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti langsung dilapangan yaitu dari kepengurusan kelompok masyarakat peduli bencana, yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi sejumlah 5 orang dan sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer, yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun instansi/dinas terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian dimaksud, digunakan beberapa teknik untuk membantu dukungan data yang diperoleh. Teknik tersebut terdiri dari a) wawancara mendalam (*indept interview*), studi dokumentasi, observasi, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan Teknologi perencanaan partisipatif (*Technology of Participation*). Pemeriksaan keabsahan data untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan pengamatan seara tekun dan berkesinambungan, selain itu juga dilakukan triangulasi, artinya dimana dalam penelitian dilakukan pengecekan data dengan berbagai sumber, cara atau teknik dan dalam berbagai waktu. dalam menganalisa data, analisis yang digunakan menggunakan analisis kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleng (2005), analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola dan menemukan yang kemudian di pelajari serta memutuskan data tersebut berupa penjelasan kepada orang lain. Adapun aktifitas yang dilakukan dalam

analisis data secara kualitatif yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Kelompok masyarakat peduli bencana merupakan kelompok lokal yang berada dalam masyarakat yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama masyarakat dan berfungsi sebagai wadah representasi kegiatan penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Secara konseptual kelompok masyarakat peduli bencana merupakan kelompok dalam masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk atas hasil keputusan masyarakat bersama. Fungsi dan peran utama KMPB ini yaitu wadah dimana masyarakat melakukan segala usaha untuk pengurangan risiko dan dampak bencana, (IDEP:2005). Sejalan dengan hal tersebut, maka pembentukan KMPB ini sebagai upaya penanggulangan bencana dengan melihat pengurangan risiko dan dampak bencana yang sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang berkembang saat ini yaitu berfokus pada kegiatan pra bencana atau pengurangan risiko bencana, bukan pada saat terjadi dan pasca bencana lagi. Adapun latar belakang pembentukan kelompok masyarakat tersebut yaitu melihat berbagai permasalahan terkait bencana khususnya permasalahan bencana tanah longsor yang ada didesa yaitu kondisi geografis desa, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal permasalahan bencana. Hal tersebut menimbulkan keinginan dari pihak-pihak masyarakat untuk membentuk suatu wadah penggerak dan sebagai pilar dalam hala penanganan ataupun upaya penanggulangan masyarakat.

Kondisi Kelompok Masyarakat Peduli Bencana ini dari pembentukannya memiliki struktur organisasi yang mengacu pada panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan terdiri dari koordinator umum, bagian penanggulangan,

bagian operasional, bagian komunikasi, dan bagian kesejahteraan. Selanjutnya pada bagian-bagian tersebut terbagi lagi dalam tim/regu sebagai berikut; regu deteksi dini, regu pemetaan, regu perintis, regu SAR dan tandu, regu keamanan, regu pengungsian, regu administrasi, dokumentasi/media dan hubungan luar, regu relawan, regu kesehatan dan pertolongan pertama, regu dapur umum serta regu hubungan sosial. Penyusunan struktur tersebut dalam tugas perannya masing-masing memiliki uraian dan peran dalam setiap tahapan bencana yaitu pada saat sebelum terjadi bencana (pra bencana), pada saat terjadi dan setelah terjadi (pasca bencana). Pada perkembangannya, hal tersebut secara struktur sudah terisi oleh masyarakat yang terdiri dari masyarakat umum, unsur tokoh masyarakat, pemuda dan unsur perempuan.

Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Untuk melihat gambaran kapasitas dari kelompok masyarakat peduli bencana tersebut maka beberapa aspek yang menjadi aspek penilaian yaitu terdiri dari: Kepemimpinan, Pengetahuan dan keterampilan, Pengelolaan Kegiatan/ Program, Kerjasama, Hubungan dengan pihak luar, Pelibatan Masyarakat, Aksesibilitas Informasi dan Keberlanjutan Kelompok. Adapun hasil wawancara yang dihimpun dari informan/partisipan penelitian sebagai berikut:

Kepemimpinan: kepemimpinan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana sejauh ini pada pelaksanaannya bagus oleh beberapa informan dan hal tersebut dapat terlihat dengan selalu adanya komunikasi dalam setiap kesempatan, keterbukaan antara sesama pengurus dan anggota dalam kelompok baik itu membahas permasalahan bencana maupun membahas pembangunan didesa. Pada dasarnya keberadaan keberadaan orang-orang dalam kepemimpinan kelompok merupakan orang-orang yang berada dalam kepengurusan desa yang dianggap bagus dalam mengemban tanggung jawab kepengurusan yang ada. **Pengetahuan dan Keterampilan:** pengetahuan dan keterampilan dari KMPB khususnya

pengurus masih mengalami keterbatasan, jadi sebagian sudah memahami dan masih ada juga sebagian yang belum memahami. Berpijak dari hal tersebut, maka masih ada keinginan untuk kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat secara keberlanjutan sehingga untuk mengingat kembali lagi pemahaman masyarakat tentang berbagai pengetahuan dan keterampilan mereka. **Pengelolaan kegiatan/program:** pengelolaan kegiatan / program dapat dilihat bahwa dalam Kelompok Masyarakat Peduli Bencana belum mempunyai rencana kerja (rencana tindak lanjut) kelompok yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama ini masih dikaitkan dengan agenda / kegiatan rutin desa / RW-RT, secara tidak langsung belum terlihat kegiatan /program khusus dari. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi penghambat utama bagaimana suatu kelompok dapat berjalan dengan optimal dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. **Kerjasama:** kerjasama dari Kelompok tersebut saat ini terjalin dengan baik, dimana adanya jalinan relasi yang baik antar sesama pengurus, anggota dan masyarakat secara umum. Hal yang mendukung eratny atau terbinanya kerjasama ini yaitu didasari dengan adanya hubungan emosional yang sudah terbina dalam masyarakat dan hal tersebut merupakan faktor penentu utama. **Hubungan dengan Pihak Luar:** Sejauh ini kelompok belum melakukan hubungan dengan pihak-pihak luar. Dalam hal hubungan yang sudah ada hanya dengan pihak desa saja, itupun respon yang ada masih kurang. Melihat hal tersebut perlu adanya fasilitasi untuk mendukung untuk pengembangan. dalam artian kelompok saat ini belum ada hubungan jejaring dengan berbagai pihak untuk menunjang keberadaan dan pelaksanaan kegiatan. **Pelibatan Masyarakat:** Aspek pelibatan masyarakat menggambarkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan Kelompok tersebut sering dilakukan karena dasarnya kelompok ini ada untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pemahaman akan permasalahan bencana yang ada diwilayah

mereka sendiri. Hal lain juga yang menjadi nilai positif dalam pelibatan masyarakat ini, dimana adanya partisipasi aktif dari masyarakat di desa ini dalam kegiatan membangun desa. **Aksesibilitas Informasi:** bahwa terkait aksesibilitas informasi kelompok dimaksud pada dasarnya sudah mengetahui harus kemana, hanya saja terkendala belum pernah melakukan hal tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan kemampuan kelompok ini dan memerlukan upaya bagaimana dan apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau informasi untuk pengembangan kelompok tersebut. **Keberlanjutan Kelompok:** hasil wawancara dengan informan, maka dalam

menggambarkan keberlanjutan kelompok ini sangat diperlukan penyusunan kegiatan sebagai pedoman kerja kelompok ini, disamping itu juga harus ada pengembangan atau pembenahan dibidang pemahaman dan pengetahuan agar kelompok ini dapat berjalan terus dan dapat menjalankan peran dalam masyarakat khususnya permasalahan bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, maka untuk melakukan *cross check* data ataupun konfirmasi dari hasil wawancara, peneliti melakukan konfirmasi tersebut melalui teknik *FGD*, gambaran kapasitas kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil FGD Gambaran Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

No.	Aspek Kapasitas	Hasil
1.	Kepemimpinan	Adanya komunikasi (musyawarah) dan keterbukaan kepada semua anggota kelompok dalam hal pelaksanaan kegiatan (tahap perencanaan sampai tahap tidanakan).
2.	Pegetahuan dan Keterampilan	Sebagian sudah memahami dan masih ada sebagian yang belum memahami tentang kebencanaan, khususnya pemahaman mengenai pengurangan risiko bencana.
3.	Pengelolaan Kegiatan	Belum optimalnya pengelolaan kegiatan karena belum adanya penyusunan rencana kerja (rencana tindak lanjut) sebagai pedoman kerja KMPB.
4.	Kerjasama	Adanya hubungan kerjasama dan hubungan emosional yang terjalin antar seluruh anggota KMPB dan masyarakat.
5.	Hubungan dengan Pihak Luar	Keanggotaan KMPB sudah memahami harus kemana berhubungan dengan pihak luar, hanya saja belum melakukan hal tersebut karena masih kendala dengan kesibukan aktivitas masing-masing.
6.	Pelibatan Masyarakat	Adanya pelibatan aktif dalam masyarakat / partisipatif dalam kegiatan KMPB.
7.	Aksesibilitas Informasi	KMPB sudah memahami jalur akses informasi mengenai permasalahan kebencanaan.
8.	Keberlanjutan Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk keberlangsungan KMPB adanya harapan pembenahan pada program/kegiatan kerja sebagai pedoman. - kesadaran pentingnya keberadaan KMPB untuk merespon permasalahan terkait bencana khususnya dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Melihat beberapa poin mengenai aspek kapasitas tersebut kemudian digali lagi hal yang menjadi prioritas dan dianggap perlu mendapatkan perhatian serius guna menguatkan kapasitas KMPB itu sendiri. Dan dari hasil diskusi tersebut maka atas saran dan pendapat peserta pada diskusi tersebut, yang

menjadi hal penting yaitu perlu ditingkatkan dalam KMPB yaitu pada aspek pengelolaan kegiatan/ program dalam Kelompok Masyarakat Peduli Bencana.

Upaya Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Merujuk dari gambaran kapasitas kelompok tersebut maka dilakukan lagi penggalan informasi dalam penelitian untuk mengidentifikasi kembali hal apa yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan atau penguatan kelompok. Hasil secara umum menjelaskan bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan kedepan kepengurusan kelompok dan masyarakat membutuhkan adanya penyusunan rencana kerja (rencana tindak lanjut) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kedepan dalam rangka memperbaiki kapasitas itu sendiri. Oleh karena itu perlu dirancang suatu kegiatan sebagai model untuk penyempurnaan model yang sudah dirancang sebelumnya. Pada pelaksanaannya, proses perancangan model tersebut menggunakan teknik partisipasi, dengan asumsi bahwa guna penyempurnaan model masyarakat menjelaskan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam rangka pengembangan kelompok, dan tentunya tetap memperhatikan aspek-aspek ketersediaan potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ataupun model penyempurnaan tersebut.

Dalam penyusunan rancangan penyempurnaan model penguatan kapasitas kelompok masyarakat peduli bencana, maka pada prosesnya meliputi beberapa hal penting sebagai tolak ukur program dalam pencapaiannya. Hal tersebut meliputi latar belakang masalah yakni dimana Secara fungsional Kelompok Masyarakat Peduli Bencana merupakan suatu wadah kelompok lokal dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah penggerak dalam menggiatkan kegiatan-kegiatan dalam penanganan masalah bencana, pengurangan risiko bencana. Melihat fungsi tersebut maka harus didukung berbagai aspek yang menjadi pendukung keberadaan kelompok, seperti struktur, sumber daya, pengetahuan, ketrampilan dan rincian program kegiatan yang jelas dan tata kelola program kegiatan yang jelas. berdasar pada gambaran kapasitas menunjukkan bahwa kelompok

tersebut membutuhkan penyusunan rencana kerja/rencana tindak lanjut yang dapat mengarahkan personil dalam KMPB dalam mengemban tanggung jawab sesuai fungsi pokok KMPB itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya penguatan kapasitas yang terfokus pada program kerja, sehingga melalui penguatan kapasitas dapat berfungsi optimal dalam rangka penanganan masalah bencana khususnya dalam pengurangan risiko bencana di masyarakat. adapun nama program yang dirancang yaitu “Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana”.

Rancangan upaya penguatan kapasitas tersebut bertujuan secara umum yaitu untuk menguatkan kapasitas kelompok dalam rangka menjalankan peran dan fungsi sebagai wadah masyarakat dalam upaya penanganan pengurangan risiko bencana. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari program yaitu: mengembangkan kapasitas kelompok khususnya pengurus, anggota dan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan bencana, tersusunnya program kerja sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas dan peran didalam masyarakat, pengembangan tata kelola program/kegiatan kelompok dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan hal-hal penting terkait pengurangan risiko bencana.

Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Community Development*, dengan taktik *Capacity Building*, *Lobi* dan *Kampanye* untuk mendukung pelaksanaan program yang telah dirancang. Sasaran dari program diarahkan pada seluruh kepengurusan kelompok dan masyarakat yang berada di Kabupaten Bandung Barat khususnya Desa Cikidang Kecamatan Lembang.

Pada pelaksanaannya upaya penguatan kapasitas kelompok tersebut terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yaitu: penyusunan agenda kegiatan/ program kerja kelompok, pembuatan kegiatan /program kerja kelompok dan pengkomunikasian agenda kegiatan/program kerja kelompok. Ketiga kegiatan tersebut bertujuan agar tersusunnya kegiatan

kelompok, peningkatan dan mempermudah pemahaman dan pengetahuan seluruh kepengurusan kelompok dan masyarakat pada kegiatan/program kerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan terkait upaya penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. selain itu tidak terlepas dalam perancangan program tersebut dilakukan pengorganisasian sebagai tim pelaksana dan analisis kelayakan program serta indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pelaksanaan program.

Implementasi Upaya Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Tahapan implementasi program atau model merupakan suatu tahapan dimana menjadi tahapan yang penting dalam suatu proses pertolongan karena pada tahapan inilah dilaksanakan berbagai upaya solusi yang merespon permasalahan yang telah teridentifikasi dan perencanaan pada tahapan sebelumnya. Tahapan implemetasi juga merupakan fase tindakan dimana dapat kita lihat sejauh mana berjalannya progres suatu intervensi pertolongan.

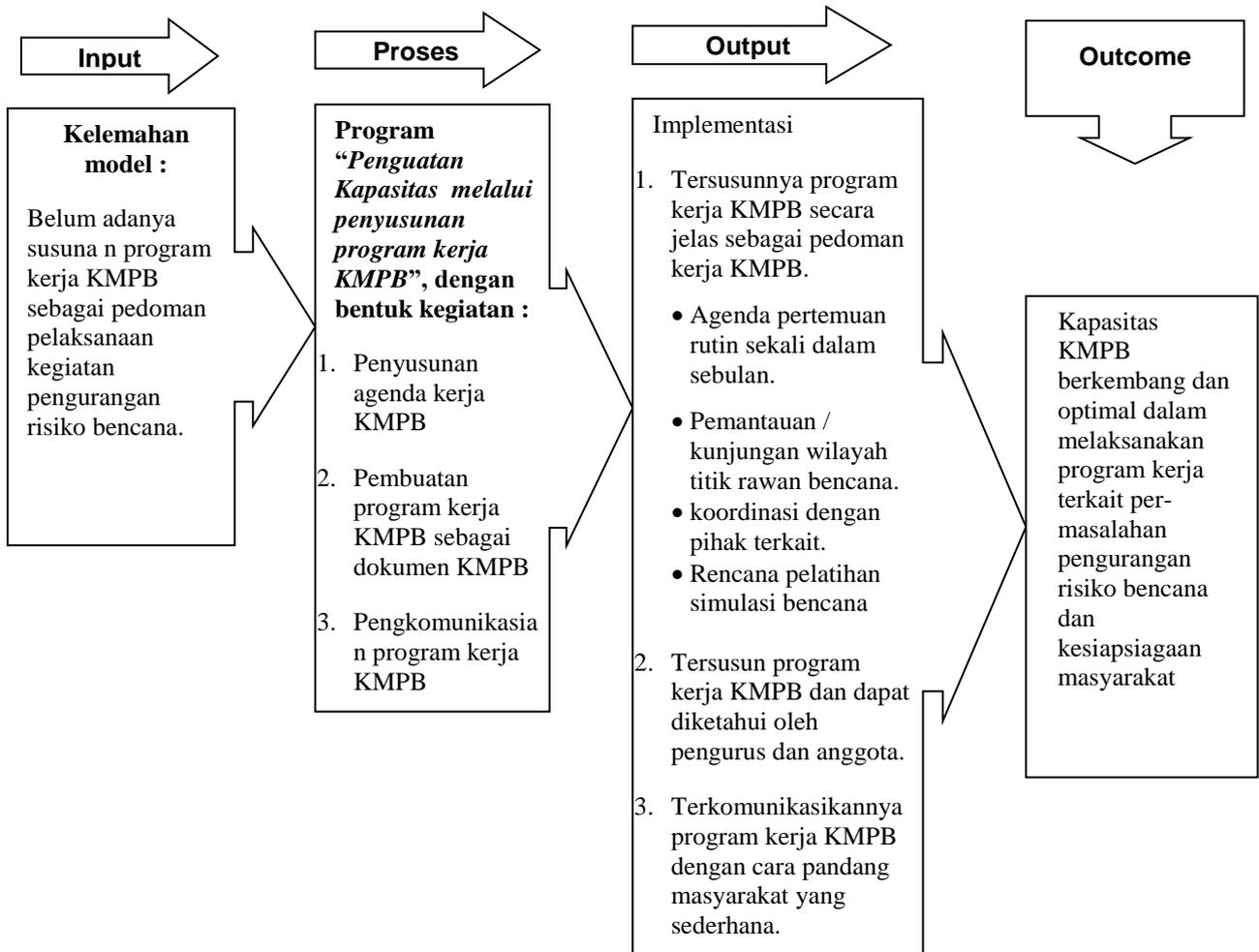
Terkait kondisi mengenai kapasitas kelompok, yang menjadi fokus prioritas untuk ditindak lanjuti yaitu pengeloaan kegiatan /program KMPB dan yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu belum tersusunnya porgram kerja yang jelas maka berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan peran di masyarakat maka secara partisipatif rancangan model yang dibutuhkan terkait penguatan kapasitas sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yaitu kegiatan penyusunan program kerja sehingga hasil akhir dari rancangan model tersebut, KMPB dapat memiliki program dan kegiatan yang jelas sebagai pedoman kerja serta KMPB dapat berkembang dan optimal dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab di masyarakat sebagai wadah masyarakat yang mampu dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan hasil perencanaan maka model yang akan dimplementasikan yaitu penguatan kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, yang dirinci melalui kegiatan:

- a) Penyusunan Agenda Kegiatan/Program Kerja KMPB, b) Pembuatan Program Kerja KMPB dan c) Mengkomunikasikan Program Kerja KMPB.

Penyempurnaan Model Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Secara umum kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan pengurus dan anggota KMPB dan masyarakat dengan baik dan respon dari pengurus, anggota KMPB dan masyarakat juga terlibat secara aktif dengan memberikan dukungan dan bekerjasama, hal tersebut dapat dilihat dari evaluasi proses yang dilakukan. Namun dilihat dari evaluasi hasil masih menunjukkan masih ada beberapa hasil maksimal dari pelaksanaan kegiatan itu dikrenakan masyarakat masih menyesuaikan waktu mereka dengan berbagai aktifitas kehidupan terkait pelaksanaan rencana pelatihan simulasi bencana. Disini menandakan bahwa untuk kedepan pengurus, anggota KMPB dan masyarakat harus mendapatkan pembinaan berkelanjutan yang dapat diwujudkan sejalan dengan agenda program kerja KMPB dan melibatkan pihak / instansi terkait guna keberhasilan KMPB pada masa yang akan datang. Untuk melihat paya penyempurnaan tersebut maka dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1
Bagan Penyempurnaan Model Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana

Kondisi awal Kelompok Masyarakat Peduli Bencana merupakan hasil pijakan dasar untuk perancangan penyempurnaan model penguatan kapasitas yang ditandai dengan belum optimalnya kelompok dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai wadah representasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Hal tersebut tergambarkan melalui pengukuran dengan melihat pada aspek kapasitas yang terdiri dari kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan, pengelolaan kegiatan/ program, kerjasama, pelibatan masyarakat, aksesibilitas informasi dan keberlanjutan program. Dari beberapa aspek yang menjadi pengukuran tersebut, temuan di

lapangan menjelaskan bahwa masyarakat khususnya pengurus dan anggota kelompok menitikberatkan perlu adanya upaya pada aspek pengelolaan kegiatan/program. Hal yang menjadi penekanan tersebut karena masyarakat menginginkan pembenahan mendasarkan pada pengelolaan kegiatan karena kebutuhan untuk berjalannya kelompok tersebut dasarnya dari aspek tersebut, dalam artian bukan menyampingkan aspek kapasitas yang lain, akan tetapi jika kelompok sudah memiliki tata kelola kegiatan/program yang tersusun sebagai acuan maka dapat perlahan memenuhi aspek kapasitas yang lain sehingga hal tersebut menjadi titik awal penguatan kapasitas kelompok dimaksud.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pada tahapan tindak lanjut perancangan model penguatan kapasitas, maka rancangan model yang akan dilakukan yaitu model penguatan kapasitas KMPB yang pada pelaksanaannya terdiri dari tiga kegiatan yang dilaksanakan terkait penguatan kapasitas, yaitu penyusunan program kerja, pembuatan program kerja dan Pengkomunikasian program kerja. Penguatan kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana merupakan alternatif yang diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dalam menjalankan peran sebagai wadah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan upaya pengurangan bencana khususnya kesiapsiagaan dalam masyarakat.

Sejalan dengan rancangan penguatan kapasitas dimaksud, maka pada implementasinya model yang dilaksanakan yaitu penyusunan agenda kerja/program, pembuatan agenda kerja/program dan pengkomunikasian program kerja pada pelaksanaannya dilakukan bersama

dengan pengurus, anggota kelompok dan masyarakat.

Kemudian dari pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan susunan kegiatan/ program kerja, pelaksanaan kemudian tidak terlepas sampai disitu, selanjutnya susunan kegiatan/program kerja kemudian dibuatkan dalam sebagai dokumen penting dan secara khusus dapat menjadi pegangan yang dapat mempermudah pemahaman, menambah pengetahuan dan kejelasan akan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga pengkomunikasian kegiatan/program merupakan upaya mempermudah pemahaman pengurus, anggota dan masyarakat dalam mengartikan kegiatan/program kerja secara sederhana sesuai dengan pemahaman masyarakat lokal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka evaluasi pelaksanaan yang sudah dilakukan memberikan gambaran akhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Kondisi Akhir Penyempurnaan Model

Kelemahan Model	Proses (tindakan)	Hasil
Pengelolaan kegiatan/ program kerja: belum adanya kegiatan/program kerja KMPB	Penyusunan agenda kerja kegiatan / program KMPB	Tersusun agenda kerja kegiatan / program KMPB meliputi : 1. Pertemuan/rapat rutin sebulan sekali. 2. Kunjungan dan pemantauan lokasi titik rawan bencana. 3. Koordinasi / share dipihak terkait. 4. Rencana kegiatan pelatihan dan simulasi bencana.
	Pembuatan agenda kerja kegiatan / program sebagai dokumen KMPB	Tersusun agenda kerja kegiatan/program KMPB sebagai bentuk visualisasi pengetahuan pengurus, anggota KMPB dan masyarakat mengenai kegiatan/program KMPB.
	Pengkomunikasian agenda kegiatan / program kerja untuk peningkatan pemahaman	Adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurus, anggota KMPB serta masyarakat dalam hal pengurangan risiko bencana di masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan pada Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli

Bencana (KMPB) sebagai Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Penelitian terkait penguatan kapasitas KMPB sebagai upaya kesiapsiagaan ini dilakukan melalui penelitian tindakan atau penelitian yang didasarkan pada refleksi awal atas penerapan model yang dilakukan pada masa praktikum, yang kemudian dari hasil tersebut disusun rancangan penyempurnaan model, implementasi atau tindakan penyempurnaan model, serta tahap refleksi akhir hasil dari pelaksanaan penyempurnaan model.

Kondisi refleksi awal pada penerapan model awal yaitu gambaran kapasitas KMPB jika dilihat dari aspek kapasitas yang terdiri dari kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan, pengelolaan kegiatan/program, kerjasama, hubungan dengan pihak luar, pelibatan masyarakat, aksesibilitas informasi dan keberlanjutan organisasi. Menunjukkan bahwa dari beberapa aspek kapasitas tersebut, memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan kegiatan/program. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya susunan kegiatan/program kerja yang dimiliki oleh KMPB sebagai acuan atau pedoman pengurus dan anggota KMPB menjalankan tugas dan peran di dalam masyarakat sebagai wadah pelaksana kegiatan penanggulangan bencana dalam masyarakat.

Hasil refleksi awal yang dilakukan terhadap aspek kapasitas KMPB menggambarkan bahwa kapasitas KMPB memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan kegiatan program KMPB, yang ditandai dengan belum adanya susunan agenda kegiatan/ program kerja KMPB sebagai pedoman pelaksanaan peran di masyarakat. Hal tersebut dijadikan fokus prioritas untuk dirancang upaya penyempurnaan model. Terkait kondisi tersebut maka upaya penyempurnaan model yang dirancang yaitu: "*Model Penguatan Kapasitas KMPB di Desa Cikidang Kecamatan Lembang*".

Pada implementasinya Model Penguatan Kapasitas KMPB dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yaitu : Menyusun agenda kegiatan/program kerja KMPB, Pembuatan

kegiatan/program kerja KMPB dan Pengkomunikasian agenda kerja/program KMPB. Secara keseluruhan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu agar tersusunnya kegiatan/program KMPB sebagai pedoman kerja seluruh keanggotaan KMPB, agar pengurus, anggota dan masyarakat mengetahui kegiatan/program KMPB secara tertulis serta agar adanya peningkatan pemahaman seluruh kepengurusan KMPB dan masyarakat mengenai kegiatan/program sebagai tugas yang harus diemban dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat.

Hasil dari implementasi penyempurnaan model penguatan kapasitas KMPB menunjukkan bahwa telah tersusunnya agenda kegiatan/program kerja KMPB sebagai pedoman pelaksanaan peran di masyarakat, seluruh pengurus, anggota KMPB dan masyarakat mengetahui, memahami apa yang menjadi kegiatan dan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi terkait kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Pada pelaksanaannya program disusun menggunakan metode *Community Organization/ Community Development*. Melalui strategi kolaborasi yaitu dimana adanya kesepakatan kerjasama antara sistem perubahan (peneliti) dengan sistem sasaran (KMPB) untuk melaksanakan suatu upaya perubahan atau penyempurnaan model. Sedangkan teknik yang digunakan melalui wawancara, FGD, ToP. Selain itu juga taktik yang digunakan yaitu dengan *capacity building*, lobi serta kampanye dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mencari dukungan dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program serta mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pelibatan aktif dan bekerjasama dalam melaksanakan upaya perubahan.

Peran pekerja sosial yang dimainkan dalam pelaksanaan penelitian penguatan KMPB ini yaitu sebagai *fasilitator, motivator, broker, enabler* dan *educator*.

Berkaitan dengan keberlanjutan dan dan capaian program kegiatan yang mungkin perlu ditingkatkan maka perlunya dilakukan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut untuk peningkatan program kedepan. Adapun beberapa rekomendasi terkait kegiatan, yaitu:

Kepada Pengurus dan Anggota KMPB, Keberadaan KMPB di masyarakat merupakan suatu harapan yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya wadah yang menjadi pilar terdepan di masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanganan masalah bencana khususnya pengurangan risiko bencana, sehingga tujuan eksistensi KMPB dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dan apa yang sudah dilakukan bersama baik dari masa praktikum maupun penelitian tetap dipelihara.

Kepada Pemerintah Desa, pada pelaksanaannya program penguatan kapasitas KMPB masih memiliki kekurangan-kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian dengan tujuan pengembangan dan dukungan dalam mencapai harapan menjadi KMPB dan masyarakat tangguh, yang mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di masyarakat.

Kepada Instansi terkait, untuk menunjang upaya-upaya dalam penanganan permasalahan bencana yang dihadapi, dimana masyarakat dan KMPB merupakan mitra pemerintah atau instansi terkait seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BPBD, Dinsos, dan yang lain, dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dikaitkan dengan program yang dilaksanakan yaitu upaya penguatan kapasitas yang sudah dilakukan harus perlu ada respon kedepan sebagai dasar untuk penciptaan tujuan pengembangan masyarakat tangguh bencana.

Daftar Pustaka

- Lassa, Jonathan. 2009. *Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*. Jakarta: Grasindo
- Millen, Anneli. 2006. *Capacity Building*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Moleong, Lexi J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kary
- Nugroho, Kharisma & Yon Men Kwan. 2011. *Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas di Indonesia. Gerakan, Pelembagaan dan Keberlanjutan*. Jakarta
- Suwarsih Madya. 2007. *Teori dan Praktik. Penelitian Tindakan (Action Research)*, Bandung: Alfabeta
- Soempeno. 2002. *Capacity Building: Persiapan dan Perencanaan, Catholic Relief Services*. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- UNDP-UNDRO. 1992. *Tinjauan Umum Manajemen Bencana, Program Pelatihan Penanganan Bencana*
- Yayasan IDEP. 2005. *Panduan Umum Pengurangan Bencana Berbasis Masyarakat*
- Sumber lain:
- Himpunan Peraturan Perundangan tentang Penanggulangan Bencana 2008
- BNPB. 2011. *Jurnal Penanggulangan Bencana*. Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Jakarta
- 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta